SALINAN

# BUPATI KARANGANYAR
# PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2024.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen yang memuat perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA yang merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
9. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
11. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
12. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran atau beban kerja atau biaya yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.
13. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan fisik/konstruksi.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam satu tahun pelajaran.

BAB II
STANDAR HARGA

Pasal 2

(1) Standar Harga tahun anggaran 2024 sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. SSH;
    b. HSPK;
    c. SBU; dan
    d. ASB.

BAB III
PENGGUNAAN STANDAR HARGA

Pasal 3

(1) Nilai pada Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan :
    a. lokasi penggunaan barang dan jasa yaitu lokasi terjauh dari pusat Daerah;
    b. harga tertinggi di Daerah;
    c. pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    d. keuntungan maksimal dari penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam menyusun RKA/RKAP/DPA/DPPA dan RAB, harus mempertimbangkan hal sebagai berikut :
    a. harga barang/jasa pada lokasi setempat;
    b. biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    c. efisiensi dan efektivitas, serta asas kepatutan dan kelayakan.
(3) Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan bagi :
    a. seluruh kegiatan yang dibiayai oleh APBD termasuk APBS dan rencana anggaran pada BLUD;
    b. seluruh kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Daerah; dan
    c. seluruh kegiatan yang berasal dari bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah.

(4) Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai pedoman dan acuan tertinggi dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan ketentuan Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka berlaku ketentuan:

a. penggunakan harga yang terendah untuk barang/jasa sejenis dengan mempertimbangkan:
   1) kualitas yang sama pada lokasi setempat; dan
   2) biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. penggunaan harga dan proses yang paling efisien untuk penyelesaian pekerjaan dan/atau pemilihan barang/jasa sejenis.

Pasal 5

(1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi kondisi dimana harga dan/atau jenis barang/jasa tidak sesuai dengan Standar Harga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka proses pengadaannya harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan kemanfaatannya dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Dalam hal pengadaan/pembelian barang/jasa melebihi harga tertinggi dan/atau belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat menggunakan standar satuan biaya resmi lain atau mengacu pada harga perkiraan sendiri yang diperoleh melalui survei harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penggunaan standar satuan biaya resmi lain dan/atau Harga Perkiraan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan/izin dari Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 62) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Mei 2023
BUPATI KARANGANYAR,
ttd.
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd.
TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417199032007

**8.1.02.02.13.0004.00009** **Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS di Luar Daerah Type ASB-001A3**

**Batas/Asumsi** Swakelola, Luar Daerah (Dalam dan Luar Provinsi), ***Fullboard,*** Gedung Sewa, Fasilitas ruang pertemuan & perlengkapan, Menginap (10 hari, 9 malam), Narasumber Campuran 1 (Pejabat Eselon III/Yang Disetarakan, Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan (Dari Internal Untuk Internal OPD), dan Pejabat Eselon III/Yang Disetarakan (Dari Internal Untuk Internal OPD)), Maks. 100 Orang Peserta, **Pelaksanaan 10 hari (1 hari Maks. 5 jam)**, Fasilitas Transportasi 2 hari (Mengantar-Jemput saja), Snack dan

**PARAMETER**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jumlah Output | 1 | Kegiatan | |
| Jumlah Peserta | 100 | Orang | |
| Jumlah Panitia | 10 | Orang | |
| Jumlah Narasumber Campuran 1 (Pejabat Eselon III/Yang Disetarakan, Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan (Dari Internal Untuk Internal OPD), dan Pejabat Eselon III/Yang Disetarakan (Dari Internal Untuk Internal OPD)) | 3 | Orang | |
| Jumlah Total Jam Pelajaran | 61 | Jam Pelajaran | 1 JP = 45 menit (8 JP = 360 menit atau 6 jam) |
| Jumlah Kelas | 1 | Kelas | |
| Lama Pelaksanaan Kegiatan | 10 | Hari | Maksimal 5 jam per hari |

| Kode Barang | Nama Rekening (Rekening Belanja) | Jenis Biaya | Rincian Komponen (dari SSH) | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Koef 1 | Koef 2 | Koef 3 | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)=(6x7x8x9) |
| | | | **Biaya Personil** | | | | | | |
| 8.1.02.02.01.0003 | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | FC | Honorarium Narasumber, Moderator Atau Pembawa Acara Profesional: Honorarium Pembawa Acara Profesional | orang/ kegiatan | 750.000 | 1 | 10 | 1 | 7.500.000 |
| 8.1.02.02.01.0003 | | FC | Honorarium Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III/Yang Disetarakan | orang/ jam | 900.000 | 1 | 5 | 3 | 13.500.000 |
| 8.1.02.02.01.0003 | | FC | Honorarium Narasumber: Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan (Dari Internal Untuk Internal OPD) | orang/jam | 400.000 | 1 | 5 | 3 | 6.000.000 |
| 8.1.02.02.01.0003 | | FC | Honorarium Narasumber: Pejabat Eselon III/Yang Disetarakan (Dari Internal Untuk Internal OPD) | orang/ jam | 360.000 | 1 | 5 | 4 | 7.200.000 |
| 8.1.02.02.13.0001 | Beban Kursus Singkat/Pelatihan | FC | Transportasi Narasumber /Tenaga Pengajar/Widyaiswara : Lingkup Jateng | orang/ pp | 300.000 | 2 | 1 | 1 | 600.000 |
| 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | FC | Penginapan Perjalanan Dinas Ke Jawa Tengah Selain Eks Karesidenan Surakarta Tingkat D (Narasumber Internal) | orang/ hari | 954.000 | 2 | 3 | 1 | 5.724.000 |
| | | VC | Penginapan Perjalanan Dinas Ke Jawa Tengah Selain Eks Karesidenan Surakarta Tingkat E | orang/ hari | 600.000 | 100 | 9 | 1 | 540.000.000 |
| 8.1.02.02.04.0036 | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | VC | Sewa Kendaraan Di Jateng Dan DIY : Bus Besar | hari | 4.500.000 | 2 | 1 | 1 | 9.000.000 |
| | | | **Biaya Non Personil** | | | | | | |
| 8.1.02.02.05.0002 | Beban Sewa Bangunan Gudang | FC | Sewa Tempat/Gedung : 50 S.D 100 Orang | hari | 3.000.000 | 10 | 1 | 1 | 30.000.000 |
| 1.1.12.01.03.0001 | Alat Tulis Kantor | VC | Bolpoin Gel | buah | 7.700 | 110 | 1 | 1 | 847.000 |
| 1.1.12.01.03.0001 | | VC | Buku Blocknote | buah | 7.000 | 110 | 1 | 1 | 770.000 |
| 1.1.12.01.03.0001 | | FC | Snelhecter Plastik (Spring File) | buah | 11.000 | 20 | 1 | 1 | 220.000 |
| 1.1.12.01.03.0001 | | FC | binder Clip Nomor 260 | dus | 33.000 | 3 | 1 | 1 | 99.000 |
| 1.1.12.01.03.0001 | | FC | Spidol Permanen Besar | buah | 9.300 | 5 | 1 | 1 | 46.500 |
| 1.1.12.01.03.0002 | Kertas dan Cover | FC | Amplop Persegi (Sedang) | dus | 16.500 | 1 | 1 | 1 | 16.500 |
| 1.1.12.01.03.0002 | | FC | Kertas HVS 70 Gram Folio | rim | 63.200 | 5 | 1 | 1 | 316.000 |
| 1.1.12.01.03.0002 | | FC | Kertas HVS 70 Gram Kwarto | rim | 56.100 | 2 | 1 | 1 | 112.200 |
| 1.1.12.01.03.0006 | Bahan Komputer | FC | Refill Tinta Catride : Toner Laser Jet | liter | 330.000 | 1 | 1 | 1 | 330.000 |
| 1.1.12.01.03.0006 | | FC | Refill Tinta Catride : Blank Ink | Botol | 148.500 | 2 | 1 | 1 | 297.000 |
| 1.1.12.01.03.0006 | | FC | Refill Tinta Catride : Colour Ink | set | 94.000 | 1 | 1 | 1 | 94.000 |
| 1.1.12.01.03.0003 | Bahan Cetak | VC | Cetak Blangko Piagam/Sertifikat | Lembar | 6.000 | 100 | 1 | 1 | 600.000 |
| 1.1.12.01.03.0003 | | FC | fotokopi : Folio HVS 70 gram | lembar | 600 | 2000 | 1 | 1 | 1.200.000 |
| 1.1.12.01.03.0003 | | FC | Cetak Digital : Cetak MMT 530 g | meter | 62.500 | 3 | 1 | 1 | 187.500 |
| | | VC | Cetak Digital : Cetak Notebook (Jilid Spiral dan Laminasi) | buah | 7.700 | 100 | 1 | 1 | 770.000 |
| 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | VC | Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD | orang/jamu an | 15.000 | 112 | 10 | 1 | 16.800.000 |
| 8.1.02.01.01.0052 | | VC | Jamuan Makan Perseorangan (Siang/Malam): Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus dan Kegiatan lain sejenis untuk OPD | orang/ jamuan | 35.000 | 112 | 10 | 1 | 39.200.000 |
| 8.1.02.02.13.0001 | Beban Kursus Singkat/Pelatihan | VC | Diklat Teknis/Fungsional/Prajabatan/Latsar /Kepemimpinan : Tanda Peserta/Panitia Penyelenggaraan Diklat | buah | 25.000 | 110 | 1 | 1 | 2.750.000 |
| 8.1.02.02.13.0001 | | VC | Diklat Teknis/Fungsional/Prajabatan/Latsar /Kepemimpinan : Tas Peserta Diklat | buah | 125.000 | 100 | 1 | 1 | 12.500.000 |
| 8.1.02.02.13.0001 | | VC | Lain-Lain Khusus Diklat : Cetak Buku Panduan/Juklak | buku | 15.000 | 100 | 1 | 1 | 1.500.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL BIAYA** | **KEGIATAN** | | | | | **681.429.700** |
| | | | **PEMBULATAN** | | | | | | **681.430.000** |

BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

JULIYATMONO